

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMITE MANAJEMEN
RISIKO, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN KEPEMILIKAN PUBLIK
TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

RAHMAN BUNGSU BUYUNG REFORMIR
NIM : 2017310752

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rahman Bungsu Buyung Reformir
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Mei 1998
N.I.M : 2017310752
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh ukuran perusahaan, komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal:

Co. Dosen Pembimbing,
Tanggal:

(Dra. Gunasti Hudiwinarsih, Ak.,M.Si.)

NIDN: 0713115901

(Lufi Yuwana Mursita, S.E., M.Sc.)

NIDN: 0726109401

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal:

Dr. Nanang Shonhadji, SE, M.Si., Ak., CA.

***THE EFFECT OF COMPANY SIZE, RISK MANAGEMENT COMMITTEE,
BOARD OF COMMISSIONERS, AND PUBLIC OWNERSHIP ON RISK
MANAGEMENT DISCLOSURE***

Rahman Bungsu Buyung Reformir

STIE Perbanas Surabaya

E-mail: 2017310752@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of company size, risk management committee, board of commissioners, and public ownership on risk management disclosure. This study uses secondary data from annual reports on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2015-2019. The data collection method in this study used purposive sampling method. The number of companies in this study were 45 companies that fit the sample criteria. The technique for analyzing data uses multiple regression analysis using the SPSS version 23 to see the effect of independent variables on the dependent variable. The results of this study explain that company size have an effect on the risk management disclosure, while risk management committee, board of commissioners, and public ownership have no effect on risk management disclosure.

Keywords: Company Size, Risk Management Committee, Board of Commissioners, and Public Ownership On Risk Management Disclosure.

PENDAHULUAN

Pengungkapan manajemen risiko diartikan sebagai proses yang telah mengalami pengaruh dari personel lain dan manajemen dalam suatu kelompok organisasi, merangkum semua kelompok organisasi, dan dipraktikan kedalam strategi, kemudian dirancang agar dapat mendeteksi suatu masalah yang dapat memengaruhi organisasi tersebut dan juga mampu memberikan kepastian yang berhubungan dengan tujuan dari suatu kelompok organisasi

(Mamduh, 2012:19). Untuk menyajikan informasi kepada para calon investor maupun *stakeholder*, perusahaan didorong agar dapat lebih transparan pada saat penyajian laporan keuangan. Terdapat beberapa berita yang telah ditunjukkan oleh suatu entitas dapat menentukan apakah investor akan melakukan investasi atau tidak. Pada saat ini, hal tersebut menjadi fokus utama para pemegang saham yang disebabkan oleh beberapa hal akuntansi yang menyimpang dan

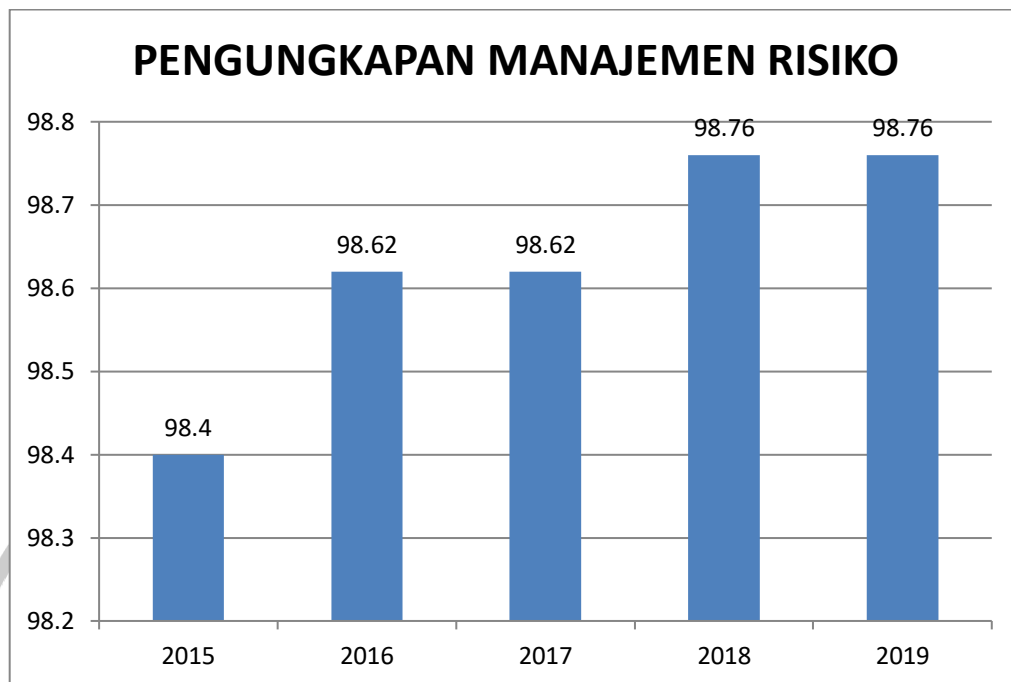
menimpa entitas-entitas besar (Baredi, 2016). Pada umumnya pengungkapan risiko di dalam laporan keuangan dianggap sebagai suatu langkah maju yang cukup penting. Menurut Probohudono (2013) bahwa kemampuan untuk membantu mengurangi rasa kepercayaan masyarakat, interaksi harus lebih baik karena dibutuhkan dan merupakan regulator yang baru bereaksi.

Peristiwa yang menimpa Enron dan World Com merupakan salah satu faktor runtuhnya perusahaan di dunia karena tidak memiliki *corporate governance* yang baik serta adanya kelemahan terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi secara lebih transparan termasuk pengungkapan informasi terkait risiko perusahaan karena laporan keuangan digunakan oleh para pengguna untuk kepentingan investasi maupun untuk mengetahui kondisi perusahaan. Adanya risiko dalam setiap kegiatan usaha, perusahaan dituntut untuk mampu mengendalikan dan memberikan solusi terkait pengelolaan risiko. Peningkatan *corporate governance* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko perusahaan. Dengan cara ini, kualitas pelaporan keuangan perusahaan akan meningkat karena informasi yang disampaikan tidak

hanya informasi terkait keuangan tetapi juga pengungkapan informasi terkait risiko perusahaan. Peningkatan *corporate governance* dapat dilakukan dengan penerapan manajemen risiko untuk menghindari dan mengelola risiko yang ada dalam perusahaan.

Menurut Setyarini (2011), penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan perlakuan yang tepat terhadap risiko yang akan memengaruhinya. Perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko dengan cara pengungkapan risiko atau *risk management disclosure*. Pengungkapan manajemen risiko merupakan faktor penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena dapat menginformasikan tentang pengelolaan risiko yang dilakukan, serta efek dan dampaknya terhadap masa depan perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi mengenai manajemen risiko dalam perusahaan maka perusahaan telah berusaha untuk menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi kepada para pemegang saham (Yogi dan Anis, 2014).

Berikut ini disajikan data rata-rata pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dalam bentuk persen (%):



Gambar 1

RATA-RATA PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan perbankan ini mengalami kenaikan dari tahun 2015-2016 dan tidak berubah atau tetap sampai tahun 2019. Peningkatan pengungkapan manajemen risiko pada dasarnya diakibatkan oleh tuntutan pengungkapan manajemen risiko oleh pihak yang berkepentingan dan sebagai realisasi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat isu mengenai pembobolan 14 Bank BUMN dan Swasta oleh perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance senilai 14 triliun rupiah yang terdapat pada *website* liputan6.com. PT SNP berhasil memperoleh kredit dari Bank

Mandiri sebesar 10 triliun rupiah sedangkan sisanya sebesar 4 triliun rupiah adalah akumulasi dari 13 Bank lainnya yang terdiri dari. Hal ini terjadi karena ketidak hati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit serta tidak berjalannya pengelolaan manajemen risiko dengan baik. Hal ini disebabkan karena ada rekayasa dalam pembukuan laporan keuangan yang dilakukan salah satu *The Big Five* akuntan publik di Indonesia atas laporan keuangan SNP Finance (Arnaz, 2018).

Kasus kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap keandalan dan keakuratan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap tidak

menggambarkan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada perusahaan tetapi hanya disusun berdasarkan standar dan aturan akuntansi. Hal ini menyebabkan banyak permintaan dari para pemegang saham agar perusahaan melakukan perluasan pengungkapan dalam laporan keuangan (Gunawan dan Zakiyah, 2017).

Untuk menghindari risiko yang dihadapi perbankan serta untuk melindungi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka perbankan dituntut untuk mampu mengelola manajemen risiko dengan baik (Lindrianasari dkk., 2019). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui peraturan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko yakni diantaranya, ukuran perusahaan, komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan publik pada perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sumber daya yang dimiliki perusahaan yakni sumber modal dan sumber daya manusia. Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan risiko karena semakin besar industri maka

semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di perusahaan sehingga pengungkapan risiko akan semakin luas dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap investor (Syifa', 2013). Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan cara memakai total aset, pendapatan atau modal dari suatu perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edo dan Luciana (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan Falendro (2018) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Komite manajemen risiko adalah komite yang dibentuk oleh dewan direksi. Komite manajemen risiko bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Alijoyo dan Zaini, 2004). Keberadaan komite manajemen dapat meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko, serta mendorong perusahaan untuk mengungkapkan risiko yang dihadapi (Utami, 2015). Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga pengungkapan manajemen risiko menjadi lebih luas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhani dan Utami (2015) menunjukkan hasil bahwa komite manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan

komite manajemen risiko menunjukkan hasil tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko (Sinaga, 2018).

Dewan komisaris diartikan sebagai organ perusahaan bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi (KNKG, 2012). Menurut Desender (2007) jumlah anggota dewan yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko. Dewan komisaris memiliki peran yang penting entitas dalam kegiatan *good corporate governance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifurakhman dan Laksito (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko (Gunawan dan Zakiyah, 2017).

Kepemilikan publik diartikan sebagai jumlah saham yang dimiliki oleh publik pada sebuah perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik akan dapat memberikan banyak informasi mengenai pengungkapan manajemen risiko yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham (Saputro dan Suryono, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyarningsih dan Gunawan (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widhiawati dan

Halmawati (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat ketidaksamaan hasil penelitian dan tidak menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian tersebut. Oleh sebab itu, saat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian ulang mengenai ukuran perusahaan, komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan sejumlah 45 perusahaan yang namanya telah tercantum di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2015-2019 menjadi pilihan dikarenakan pada periode ini terdapat laporan keuangan tahunan yang dapat dijadikan sebagai sumber data bagi peneliti.

RERANGKA TEORETIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Dari sudut pandang teori agensi, prinsipal (pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Menurut Jensen dan Meckling (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal (pemilik), menyewa orang lain yaitu *agent* (manajer) untuk melakukan aktivitas dalam perusahaannya. Hubungan antara agent dan prinsipal seringkali menimbulkan permasalahan yang disebabkan

karena terdapat selisih kepentingan antara pihak manajemen dan pihak investor atau yang bisa disebut asimetri informasi. Munculnya asimetri informasi merupakan konsekuensi dari adanya *agency conflict*.

Dalam praktik *risk management disclosure*, teori keageanan dapat menjelaskan bagaimana manajer memberikan informasi mengenai risiko kepada pemegang saham dan kreditur dengan menyediakan informasi yang reliabel. Ketersediaan informasi yang reliabel mengenai risiko oleh manajer kepada pemegang saham dan kreditur akan mengurangi masalah asimetri informasi (Elzahr dan Hussainey, 2012). *Agent* memiliki lebih banyak informasi karena berhubungan langsung dengan kegiatan dari suatu perusahaan, sedangkan prinsipal mengandalkan informasi yang diungkapkan oleh *agent* (manajemen) di laporan tahunan perusahaan. Terdapat informasi penting yang dijelaskan oleh *agent* ini biasanya tidak sesuai dengan kondisi aktual dari suatu entitas. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, pihak perusahaan mengungkapkan dan melaporkan informasi sebagai wujud pelaksanaan prinsip *corporate governance* transparansi dan akuntabilitas. Satu elemen penting untuk memperkuat *corporate governance* adalah praktik pengungkapan manajemen risiko (Tarantika dan Solikhah, 2019).

Stakeholder Theory

R. Edward Freeman pada tahun 1984 mencetuskan

Stakeholder Theory untuk pertama kalinya. Teori *stakeholder* mengartikan bahwa perusahaan-perusahaan tidak hanya berfokus pada operasi tetapi juga harus berfokus pada kepentingan dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi para pemegang saham. Ghozali dan Chariri (2007:409) menyatakan bahwa dalam *stakeholder theory* perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian maka keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.

Salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder* yaitu melalui praktik pengungkapan manajemen risiko. Pada saat *stakeholder* memberikan support dengan cara mengelola sumber-sumber ekonomi yang baik maka suatu entitas akan melakukan pengungkapan informasi perusahaan dengan lebih luas dan transparan supaya dapat membuat nilai lebih untuk kemudian menunjang kinerja keuangan dan nilai perusahaan serta meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder* (Devi dkk., 2017). Perspektif teori ini menjelaskan masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan.

Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengungkapan manajemen risiko atau *risk management*

disclosure merupakan pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa mendatang. Penerapan manajemen risiko juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko perusahaan pada setiap kegiatan, serta mengukur dan mengatasinya pada level toleransi tertentu. Oleh karena itu, struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada stakeholders organisasi (Setyarini, 2011).

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) pada tahun 2004, setelah COSO mengeluarkan *Enterprise Risk Management Report – Integrated Framework* manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimonitori secara berkala dan berkesinambungan oleh pihak-pihak internal perusahaan yang memiliki wewenang, dengan merumuskan strategi organisasi yang diaplikasikan dalam kegiatan operasional perusahaan yang mencakup seluruh bagian/unit pada organisasi serta disesuaikan dengan masing-masing risiko yang dihadapi perusahaan, manajemen risiko juga dirancang untuk mengidentifikasi suatu keadaan potensial yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen risiko diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengungkapan manajemen risiko dapat dihitung

dengan menggunakan COSO (Arsyil dkk., 2018):

$$PMR = \frac{\text{Total Pengungkapan Risiko}}{108 \text{ item pengungkapan}}$$

Menurut peraturan dari Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 - Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yakni terdiri sebagai berikut:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar:
 - a. Risiko suku bunga
 - b. Risiko nilai tukar
 - c. Risiko komoditas
 - d. Risiko ekuitas
3. Risiko likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategik
8. Risiko kepatuhan

Dalam memperhitungkan pengungkapan risiko ini dapat dihitung dengan cara menjumlah item-item pengungkapan manajemen risiko yang nanti perusahaan akan lakukan dibagi dengan jumlah total item-item pengungkapan manajemen risiko tersebut. Terdapat 11 kelompok jenis pengungkapan risiko yang diungkapkan manajemen risiko yang selanjutnya didalam Tabel pengelompokan risiko nantinya diberi nilai satu apabila entitas melakukan suatu pengungkapan risiko. Tiap item dari pengungkapan manajemen nantinya dapat diungkapkan didalam laporan tahunan pada tahun tersebut. Pengungkapan manajemen risiko dapat dihitung dengan:

$$PMR = \frac{\text{Total Pengungkapan Risiko}}{11 \text{ item pengungkapan}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil suatu perusahaan. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar (Ratnawati, 2012). Total aset dipilih sebagai proksi dari variabel ukuran perusahaan dikarenakan total aset lebih stabil dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibanding kapitalisasi pasar dan penjualan yang sangat dipengaruhi oleh *demand and supply* (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kegiatan usaha yang lebih lengkap yang mungkin akan berakibat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungannya sehingga dilakukan pengungkapan informasi yang lebih baik untuk menunjukkan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Rumus ukuran perusahaan dapat dihitung (Arsyil dkk., 2018):

$$UP = \ln \text{ Total Aset}$$

Komite Manajemen Risiko

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2012) menyatakan bahwa komite manajemen risiko adalah organ dewan komisaris yang membantu pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan.

Saat ini, keberadaan komite manajemen risiko dirasa sebagai sebuah pengawasan penting komite dewan (Subramaniam dkk., 2009:). Secara umum, luas area tanggung jawab dari komite manajemen risiko adalah:

1. Menentukan strategi manajemen risiko organisasi;
2. Mengevaluasi operasi manajemen risiko organisasi;
3. Menilai pelaporan keuangan organisasi;
4. Memastikan bahwa organisasi patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sektor perbankan, RMC disebut pula dengan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum yaitu tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum adalah pembentukan komite pemantau risiko. Komite ini merupakan komite yang berada di bawah dewan komisaris, yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan, khususnya di bidang manajemen risiko. Pengukuran menggunakan variabel dummy yaitu apabila perusahaan memiliki KMR baik yang terpisah dengan komite audit maupun yang tergabung diberi nilai 1 dan diberi nilai 0 jika tidak terdapat KMR (Risna dkk., 2019).

Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organisasi perseroan yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perseroan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016). Di Indonesia, ukuran dewan komisaris diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. Di dalamnya diatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Menurut peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris berperan untuk mengawasi penerapan manajemen risiko dan memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif. Ukuran dewan komisaris dapat dihitung (Arsyil dkk., 2018) :

UDK = Jumlah Dewan Komisaris

Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham oleh masyarakat umum atau publik dalam perusahaan (Sulistyaningsih dan Gunawan, 2016). Semakin banyak saham yang dimiliki publik maka semakin banyak *stakeholder* yang harus merasakan manfaat dalam hal laporan keuangan maupun tahunan oleh perusahaan (Ruwita, 2013).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi yang bermanfaat maka pihak manajemen perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan yang transparan dan menyajikan informasi risiko yang reliabel dalam pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Kepemilikan publik dapat dihitung dengan (Arsyil dkk., 2018) :

$$KP = \frac{\text{Jumlah saham publik}}{\text{Total saham beredar}}$$

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen risiko

Ukuran perusahaan adalah bentuk dari kemampuan finansial dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Menurut teori *stakeholder* yang berhubungan dengan tanggung jawab, perusahaan besar umumnya menerapkan praktik *corporate governance* dengan lebih baik karena risiko yang terjadi berdampak juga pada *stakeholder*. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan meminimalisasi terjadinya konflik maka suatu perusahaan perlu melakukan pengungkapan manajemen risiko.

Luasnya pengungkapan manajemen risiko dipengaruhi oleh besarnya suatu perusahaan. tersebut. Semakin besar perusahaan maka pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan akan semakin luas sebagai bentuk transparansi publik untuk risiko-risiko yang dihadapi terkait dengan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* karena dasar kepemilikan yang lebih luas. Sebaliknya, semakin kecil perusahaan maka pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan perusahaan akan semakin tidak meluas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Ardiansyah dan Adnan (2014) dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Pengaruh Komite Manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Pembentukan komite manajemen risiko tidak terlepas dari teori agensi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Suatu entitas yang mempunyai komite risiko manajemen akan dapat menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai macam risiko yang nantinya akan dihadapi sehingga mampu memperluas pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, entitas yang hanya memiliki sedikit komite manajemen risiko maka pengungkapan manajemen risikonya rendah atau tidak meluas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Wicaksono dan Adiwibowo (2017), Marhaeni dan Yanto (2015) dan Utami (2015) ditemukan hasil bahwa komite manajemen risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Dewan komisaris juga mendapatkan kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham atau prinsipal yakni dewan komisaris memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Jadi kompensasi dewan diharapkan mendukung adanya KMR karena KMR yang dibentuk oleh dewan komisaris akan meningkatkan fungsi pengawasan dalam memastikan sistem pengendalian yang tepat khususnya mengenai sistem manajemen risiko oleh dewan direksi selaku manajemen sehingga selaras dengan kepentingan prinsipal. Hal ini menunjukkan bahwa investor membutuhkan sebuah tampilan atas manajemen risiko yang baik dari manajemen yang dapat mendukung penciptaan nilai bagi pemegang saham.

Menurut pandangan KNKG (2006) yakni jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas suatu perusahaan yang dimana tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah dewan komisaris yang besar dapat memberikan kontribusi penuh terhadap pengawasan dalam penerapan terhadap manajemen risiko perusahaan (Khumairoh dan Agustina, 2017). Sebaliknya, semakin kecil jumlah dewan komisaris tidak dapat menunjukkan kontribusi terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Sulistyarningsih dan Gunawan (2016), Wicaksono dan Adiwibowo (2017) dan Kusumah (2016) yang memiliki hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan

signifikan terhadap luas pengungkapan manajemen risiko.

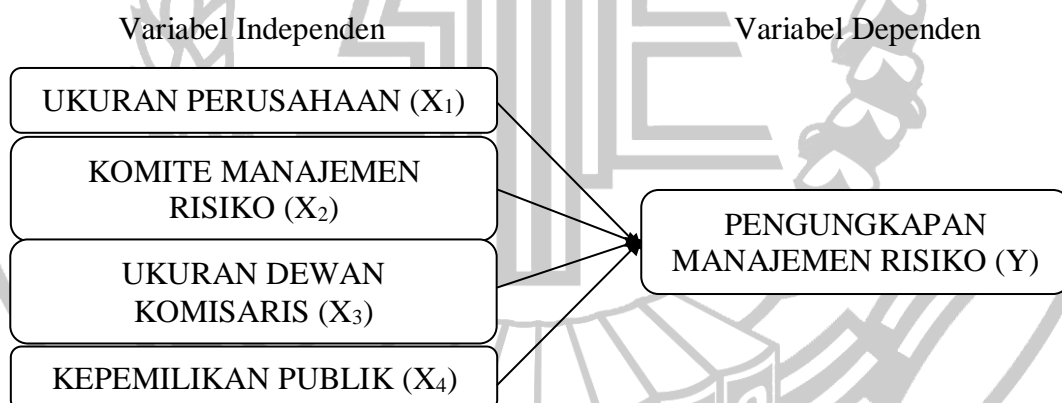
H₃ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Teori *stakeholder* menyatakan entitas jangan hanya berfokus pada tujuan perusahaan, akan tetapi perusahaan juga mampu memberikan berbagai manfaat kepada *stakeholder* yaitu para pemegang saham publik. Maka dari itu, perlu adanya pengungkapan manajemen risiko, karena pihak publik dan masyarakat umum mempunyai hak untuk dapat mengetahui luas pengungkapan manajemen risiko sebagai bentuk

transparansi di perusahaan. Semakin banyak saham yang beredar dan dimiliki masyarakat umum maka semakin banyak yang memerlukan informasi tentang risiko yang akan dihadapi suatu perusahaan dan semakin luas pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, semakin sedikit saham yang beredar dan dimiliki oleh masyarakat umum maka pengungkapan manajemen risiko akan semakin sedikit atau tidak meluas. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan Gunawan (2016) menemukan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko.

H₄ : Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko



Gambar 2
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan sejumlah 45 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

adalah metode *purposive sampling*. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah (1) Entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, (2) Entitas sektor perbankan yang tidak melaporkan laporan tahunan serta melaporkan manajemen risiko selama tahun 2015-2019, (3)

Perusahaan tidak memiliki informasi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, (4) Perusahaan perbankan yang telah *delisting*.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dengan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang didapat melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* setiap perusahaan.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan manajemen risiko. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (UP), komite manajemen risiko (KMR), ukuran dewan komisaris (UDK), dan kepemilikan publik (KP).

Definisi Operasional Variabel

Pengungkapan Manajemen Risiko

Menurut Sugiyono (2015:64) menjelaskan bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian yang sekarang ini terdapat variabel dependen yang digunakan yakni pengungkapan manajemen risiko. Pada variabel dependen ini dapat digambarkan sebagai pengungkapan dari berbagai risiko perusahaan yang dikelola untuk dapat mengatur risiko yang nanti akan berkaitan di masa depan.

Pengungkapan manajemen risiko merupakan upaya dari perusahaan yakni dengan memberikan informasi kepada pemakai laporan tahunan perusahaan apa yang dapat mengancam perusahaan sehingga dapat menjadi suatu faktor sebagai alat pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aset. Semakin besar ukuran perusahaan (total aset) maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapinya, termasuk keuangan, operasional, reputasi, teknologi dan lain-lain.

Komite Manajemen Risiko

Komite manajemen risiko didefinisikan sebagai sub komite dewan yang memberikan pendidikan manajemen risiko pada tingkat dewan untuk risiko yang tepat dan strategi risiko, perkembangan kepemilikan pengawasan manajemen risiko oleh dewan dan *review* pelaporan risiko perusahaan.

Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Ukuran dewan komisaris dihitung dengan menggunakan total jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan.

Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik diartikan sebagai kepemilikan investor atas jumlah saham yang

telah dimiliki pada perusahaan. Kepemilikan saham para investor merupakan prosi dari jumlah saham yang beredar.

Alat Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan analisis statistik deskriptif. Persamaan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = pengungkapan manajemen risiko
- α = konstanta
- β_1 = koefisien regresi ukuran perusahaan
- β_2 = koefisien regresi komite manajemen risiko
- β_3 = koefisien regresi ukuran dewan komisaris
- β_4 = koefisien regresi kepemilikan publik
- X1 = ukuran perusahaan
- X2 = komite manajemen risiko
- X3 = ukuran dewan komisaris
- X4 = kepemilikan publik
- e = faktor pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data dalam penelitian. Analisis deskriptif yang digunakan dan akan dibahas

pada bagian ini adalah nilai maksimum, minimum, *mean* (rata-rata), dan deviasi standar dari variabel dependen dan variabel independen.

Analisis Deskriptif Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan manajemen risiko ini menjelaskan sebagai pengungkapan juga bagian dari beberapa risiko yang terdapat pada perusahaan dan dikelola agar dapat mengatur dan memperhitungkan risiko-risiko yang berhubungan di masa yang akan datang.

Tabel 1
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF
VARIABEL DEPENDEN

Tahun	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PMR (2015-2019)	223	0,90625	1,00000	0,986337	0,0282515
PMR (2015)	45	0,90625	1,00000	0,984012	0,0307793
PMR (2016)	45	0,90625	1,00000	0,986192	0,0283656
PMR (2017)	45	0,90625	1,00000	0,986192	0,0283656
PMR (2018)	45	0,90625	1,00000	0,987645	0,0273959
PMR (2019)	43	0,90625	1,00000	0,987645	0,0273959

Tabel 1 hasil dari SPSS dapat dilihat bahwa pada pengungkapan manajemen risiko selama lima tahun periode pengamatan. Jumlah sampel (N) sebanyak 223 perusahaan. Data ini adalah total data dalam jangka waktu lima tahun. Nilai minimum sebesar 0,9063 menunjukkan bahwa selama lima tahun, entitas paling sedikit sebanyak delapan risiko. Salah satu

perusahaan yang memiliki nilai pengungkapan manajemen risiko minimum sebesar delapan item dari 11 item yang harus diungkapkan adalah Bank MNC Internasional Tbk pada tahun 2015. Sedangkan perusahaan dengan nilai pengungkapan manajemen risiko maksimum sebesar 11 item dari 11 item yang harus diungkapkan adalah Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk pada tahun 2019.

Nilai maksimum sebesar 1,0000 menunjukkan bahwa selama lima tahun perusahaan paling banyak mengungkapkan sebelas item risiko yang dihadapi. Risiko-risiko yang paling sering diungkapkan oleh entitas yakni risiko kredit, risiko suku bunga, risiko ekuitas, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko statrejik. Rata-rata selama lima tahun adalah 0,9863. Deviasi standar dari data ini sebesar 0,0283. Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai deviasi standar lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) maka dapat dikatakan bahwa data bersifat homogen yang berarti rata-rata pengungkapan manajemen risiko mempunyai tingkat penyimpangan yang rendah.

Nilai mimum yang terdapat pada entitas tersebut disebabkan oleh jumlah item yang diungkapkan perusahaan tergolong sedikit sehingga ketika jumlah item manajemen risiko yang diungkapkan oleh entitas dibagi dengan jumlah dari total item pengungkapan manajemen risiko sehingga memiliki hasil yang kecil. Begitu pula sebaliknya dengan pengungkapan manajemen risiko yang memiliki nilai maksimum. Semakin banyak

item-item pengungkapan manajemen risiko yang diungkapkan maka semakin tinggi tingkat pengungkapan manajemen risiko. Walaupun total item yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan memiliki nilai yang seragam, akan tetapi jenis-jenis item risiko yang diungkapkan akan berbeda. Hal tersebut tergantung dari kondisi yang dihadapi oleh perusahaan.

Analisis Deskriptif Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ada empat variabel yaitu ukuran perusahaan (UP), komite manajemen risiko (KMR), ukuran dewan komisaris (UDK), dan kepemilikan publik (KP). Tabel 2 merupakan hasil analisis statistik deskriptif variabel independen, sebagai berikut:

Tabel 2

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL INDEPENDEN

	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviasi</i>
UP	13,13 94	21,07 16	17,07 39	1,8190 843
KMR	N 223	Frekuensi Komite Manajemen Risiko		
		Tidak Ada	Ada	
UDK	2,0	9,0	5,0	1,8514
KP	0,002 3	0,577 2	0,209 026	0,1575 02

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut ini merupakan hasil dari uji asumsi klasik:

1. Uji Normalitas

Tabel 3
HASIL UJI NORMALITAS
KOLMOGOROV-SMIRNOV

Keterangan	Asymp. Sig.	Kesimpulan
Pengujian normalitas 1	0,000	Tidak terdistribusi secara normal
Pengujian normalitas 2 (setelah menghilangkan outlier)	0,000	Tidak terdistribusi secara normal

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4
UJI MULTIKOLINIERITAS

Variabel Independen	Tol.	VIF	Kesimpulan
UP	0,601	1,664	Tidak terdapat multikolinieritas
KMR	0,986	1,014	Tidak terdapat multikolinieritas
UDK	0,610	1,640	Tidak terdapat multikolinieritas
KP	0,971	1,030	Tidak terdapat multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
UJI HETEROSKEDASTISITAS

Model	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	.000	
UP	.000	Terjadi Heteroskedastisitas
KMR	.614	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

UDK	.018	Terjadi Heteroskedastisitas
KP	.939	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Tabel 6
UJI AUTOKORELASI

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	DW
1	.419 ^a	.175	.160	.025899	2.231

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t yang terdapat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7
HASIL UJI t

Model	T	Sig.
(Constant)	48.067	.000
UP	3.950	.000
KMR	.073	.942
UDK	1.690	.093
KP	.087	.931

Uji Hipotesis

Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai signifikansi dari hasil uji nilainya kurang dari 0,05. Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien dan tingkat signifikansi hasil uji hipotesis dari persamaan regresi logistik sebagai berikut:

Tabel 7

Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Beta	Sig.	Hasil Pengujian
H ₁	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko	0,319	0,000	H ₁ terdukung
H ₂	Komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pengungkapan	0,005	0,942	H ₂ tidak terdukung

	manajemen risiko			
H ₃	Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko	0,136	0,093	H ₃ tidak terdukung
H ₄	Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko	0,006	0,931	H ₄ tidak terdukung

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko

Hipotesis pertama memprediksi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan maka informasi yang disajikan oleh perusahaan akan semakin banyak dan detail. Risiko yang harus diungkapkan perusahaan besar akan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar dianggap mampu untuk dapat menunjukkan informasi yang lebih banyak dan detail.

Hipotesis pertama menyatakan H₀ tidak terdukung dan H₁ terdukung sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini disebabkan oleh permintaan dari pasar yang semakin berkembang dan membutuhkan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan serta risiko yang dapat mengancam suatu entitas. Perusahaan yang besar cenderung memiliki kepemilikan saham yang lebih luas sehingga jumlah pemilik saham yang lebih luas akan memerlukan informasi keuangan yang lebih luas pula.

Menurut hasil analisis deskriptif, ketika variabel ukuran perusahaan mengalami kenaikan, maka variabel pengungkapan manajemen risiko juga ikut naik.

Contohnya, pada tahun 2015 ukuran perusahaan naik sementara pengungkapan manajemen risiko juga naik. Pada tahun 2016, ketika ukuran perusahaan naik, pengungkapan manajemen risiko juga ikut naik. Begitupun pada tahun 2017 ke tahun 2018, ketika ukuran perusahaan naik, maka pengungkapan manajemen risiko juga ikut naik. Hal ini mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko secara positif.

Hasil penelitian ini mendukung teori *stakeholder* bahwa besarnya perusahaan akan mendorong perusahaan untuk dapat menyediakan informasi mengenai risiko-risiko perusahaan kepada para pemegang saham maupun calon investor. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Fajriah (2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Pengaruh komite manajemen risiko terhadap pengungkapan manajemen risiko

Menurut Hardana dan Syafruddin (2019), kehadiran komite

manajemen risiko yang tergabung dengan komite audit hanya bisa memberikan rekomendasi kepada direksi, namun tidak dapat memutuskan risiko apa saja yang akan diungkapkan pada laporan keuangan. Hipotesis kedua memprediksi komite manajemen risiko berpengaruh terhadap komite manajemen risiko. Perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko akan dapat menjadi lebih fokus dalam menyelesaikan berbagai macam risiko yang akan dihadapi sehingga dapat memperluas pengungkapan risiko.

Hasil uji hipotesis kedua menyatakan H_0 terdukung dan H_2 tidak terdukung sehingga dapat dikatakan bahwa komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini bermakna bahwa ada atau tidaknya frekuensi rapat yang diungkapkan oleh perusahaan tidak menjadi ukuran dalam pengungkapan manajemen risiko.

Menurut hasil analisis statistik deskriptif, tidak ditemukan hubungan yang linier antara komite manajemen risiko dan pengungkapan manajemen risiko. Contohnya, pada tahun 2015 ke tahun 2016 komite manajemen risiko turun, akan tetapi pengungkapan manajemen risiko naik. Pada tahun 2018 ke tahun 2019, komite manajemen risiko turun, akan tetapi pengungkapan manajemen risiko turun. Hal ini membuktikan bahwa komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori *stakeholder* karena ada atau tidaknya frekuensi rapat yang diungkapkan perusahaan

tidak menjadikan ukuran mengenai pengungkapan manajemen risiko kepada para pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardana dan Syafruddin (2019) dan Ardiansyah dan Adnan (2014) yang menunjukkan bahwa komite manajemen risiko tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan hasil hipotesis ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre dkk. (2018) dan Rahman dan Almilia (2018) yang menunjukkan bahwa komite manajemen risiko memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko

Menurut Ramadhani dkk. (2015) menyatakan bahwa dewan yang memiliki ukuran besar mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan direktur yang memiliki kompeten, artinya ukuran dewan komisaris lebih berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan perusahaan. Hipotesis ketiga memprediksi ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Banyaknya jumlah dewan komisaris akan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pengawasan dalam penerapan dan pengungkapan manajemen risiko perusahaan (Khumairoh dan Agustina, 2017). Sebaliknya, sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak dapat menunjukkan kontribusi terhadap pengungkapan

manajemen risiko. Ukuran dewan komisaris akan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan dewan komisaris memiliki insentif lebih untuk dapat memberikan pengawasan dalam pengungkapan manajemen risiko.

Hasil uji hipotesis ketiga menyatakan H0 terdukung dan H3 tidak terdukung sehingga dapat dikatakan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini bermakna bahwa banyaknya anggota dewan yang dimiliki perusahaan tidak menjadi ukuran akan efektifitas dalam mengungkapkan risiko-risiko yang ada di dalam perusahaan.

Menurut hasil analisis statistik deskriptif, tidak ditemukan hubungan yang linier antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan manajemen risiko. Contohnya, pada tahun 2015 ke tahun 2016 ukuran dewan komisaris turun, akan tetapi pengungkapan manajemen risiko pada tahun tersebut naik. Hal ini membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris dapat menyajikan informasi mengenai risiko perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan para investor. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan hasil hipotesis ini

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajriah (2019) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko

Hipotesis keempat memprediksi kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Banyaknya saham yang dimiliki oleh publik akan mendorong perusahaan untuk dapat menyajikan informasi mengenai risiko-risiko perusahaan secara detail.

Hasil uji hipotesis keempat ini menyatakan H0 terdukung dan H4 tidak terdukung sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko yang disebabkan informasi yang mengandung biaya. Manajemen hanya mengungkapkan informasi apabila manfaat yang didapatkan tidak melebihi biaya dari pengungkapan informasi tersebut. Banyaknya pihak yang memerlukan informasi ini maka biaya yang diperlukan perusahaan juga tidak sedikit karena perusahaan yang akan melakukan pengungkapan informasi akan mengeluarkan banyak biaya.

Menurut analisis statistik deskriptif, tidak ditemukan hubungan yang linier antara kepemilikan publik dan pengungkapan manajemen risiko. Contohnya pada tahun 2015 ke tahun 2016 kepemilikan publik naik sementara pengungkapan manajemen risiko juga naik. Namun, pada tahun 2017 ke tahun 2018

ketika kepemilikan publik turun, pengungkapan manajemen risiko tidak turun. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Menurut Fajriah (2017) kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham publik perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Besar kecilnya saham yang dimiliki oleh publik dari suatu perusahaan tidak memengaruhi pengungkapan manajemen risiko dikarenakan para pemegang saham tidak secara langsung berperan dalam proses pengungkapan mengenai informasi manajemen risiko di perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh masyarakat maka pengungkapan informasi mengenai risiko-risiko perusahaan harus diungkapkan secara lebih detail dan luas. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarantika dan Solikhah (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan hasil hipotesis ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmaniyah (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Semakin besar suatu perusahaan maka dorongan untuk dapat menyediakan informasi mengenai risiko-risiko perusahaan secara lebih detail akan semakin tinggi. (2) Komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Adanya kehadiran komite manajemen risiko yang tergabung dengan komite audit hanya bisa memberikan rekomendasi kepada direksi, namun tidak dapat memutuskan risiko apa saja yang akan diungkapkan pada laporan keuangan. (3) Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dewan yang memiliki ukuran besar mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan direktur yang memiliki kompeten, artinya ukuran dewan komisaris lebih berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan perusahaan. (4) Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Besar kecilnya saham yang dimiliki oleh publik dari suatu perusahaan tidak memengaruhi pengungkapan manajemen risiko dikarenakan para pemegang saham tidak secara langsung berperan dalam proses pengungkapan mengenai informasi manajemen risiko di perusahaan.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan penelitian ini maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang adalah: (1) Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel perusahaan, misalnya manufaktur, serta menambah periode pengamatan yang akan digunakan dalam penelitian menjadi enam tahun agar memperoleh hasil yang lebih baik. (2) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang lebih mungkin memengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Misalnya menggunakan variabel umur perusahaan, leverage, dan likuiditas.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu : (1) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini pada tahap pertama terdapat beberapa permasalahan yaitu data tidak berdistribusi normal dan telah mengeliminasi outlier sebanyak dua kali, akan tetapi data tetap tidak berdistribusi normal, sehingga data diolah dengan melewati asumsi tersebut. (2) Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa proporsi ukuran perusahaan, komite manajemen risiko, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan publik mampu memengaruhi pengungkapan manajemen risiko sebesar 16 persen, sedangkan sisanya sebesar 84 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang digunakan dalam penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Alijoyo, A., & Zaini, S. (2004). *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Ardiansyah, La Ode M., & Adnan, M. A. (2014). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Enterprise Risk Management*. Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 23(2), 89–105.
- Arnaz, F. 2018. Kasus SNP Finance, Bank Mandiri Bantah Tidak Hati-hati. <http://www.beritasatu.com/nasional/512845-kasus-snp-finance-bank-mandiri-bantahtidak-hatihatihati.html>, diakses tanggal 10 November 2019.
- Arsyil, Dini, Annisa (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)*. E-Proceeding of Management, 5(1), 769-786.
- Bangkit Prayoga, Edo & Spica Almilia, Luciana (2013). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. Jurnal Akuntansi Keuangan, 4 (1), 1-19.

- Bapepam. (2006). *Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-134/ BL/2006 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*.
- BI. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. [online] Tersedia: <http://www.bi.go.id/>.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Committee of Sponsoring Organizations (COSO). (2004). *Enterprise Risk Management - Integrated Framework. Executive Summary*. September 2004 diakses pada 24 November 2019. http://www.coso.org/documents/coso_erm_executive_summary.pdf
- Desender, K. (2007). *On The Determinants of Enterprise Risk Management Implementation*. Information Resources Management Association Annual Meeting Paper.
- Elzahar, Hany dan Khaled Hussainey. 2012. "Determinants of narrative risk disclosure in UK interim reports". *The Journal of Risk Finance*, 13(2), 133-147
- Falendro, A., Faisal, & Ghozali, I. (2018). *Karakteristik Dewan Komisaris, Komite dan Pengungkapan Risiko Perusahaan*. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 115–124.
- Fathimiyah, venny., Rudi Zulfikar dan Fara Fitriyani. 2012. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Risk Management Disclosure (Studi Survei Industri Perbankan yang Listing di BEI tahun 2008-2009)". *Simposium Nasional Akuntansi Banjarmasin*, 1-26.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, MA: Pitman Publishing.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunawan, B., & Zakiyah, Y. N. (2017). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran*

- Perusahaan, dan Leverage Terhadap Risk Management Disclosure*. Jurnal Ekspansi, 9(1), 1–18.
- Hakim, M. L., & Triyanto, D. N. (2019). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Publik, ukuran Dewan Komisaris, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)*. eProceedings of Management, 6(2), 2963-2972.
- Hardana, H., & Syafruddin, M. (2019). *Analisis pengungkapan Manajemen Risiko (Bukti Indonesia)*. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1–15.
- Imam Ghazali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen dan Meckling. (1976). "Theory of the Firm: managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". Journal of Financial Economics, Oktober, 3 (4), 305-360.
- Khumairoh, N. A., & Agustina, L. (2017). *The Roles of The Board of Commissioner in Moderating Factors Affeting The Disclosure Of Enterprise Risk Management*. Accounting Analysis Journal, 6(3), 445-457.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf, diakses pada tanggal 20 November 2019.
- Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG. (2012). *Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG (2011). *Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance*.
- Kristiono, K., Zulfahridar, Z., & Al-azhar, A. (2014). *Pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap risk management disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Riau University), 1(2), 1-15.
- Mamduh M. Hanafi. 2012. *Manajemen Risiko*. Edisi kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Omar, S., Devi, G., Phillips, N., & Cook, J. (2017). *An investigation of multistakeholder value*

- cocreation processes: a conceptual model of customer engagement, cocreation, and their impact on customer satisfaction and behavioural intentions.* 50th Academy of Marketing Conference, 3-6 July 2017, Hull University Business School, 1-6.
- Primadhyta, S. (2017). *OJK: Praktik GCG Perusahaan Indonesia Masih Tertinggal.* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180925191223-78-333175/kasusnpfinance-bank-mandiri-pidanakan-deloitteindonesia>, diakses tanggal 10 November 2010.
- Probohudono, A. N., G. Tower and Rusmin R. (2013). *Risk Disclosure During The Global Financial Crisis.* Social Responsibility Journal, 9(1), 124-136.
- Rahma, N. N., & Almilia, L. S. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Publik, Komite Manajemen Risiko, Ukuran Bank, Leverage, dan Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pertukaran Periode 2011-2015)*, 8(1), 12-24.
- Ramadhani, N., Sari, R. N., & Darlis, E. (2015). *Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Risiko Perusahaan (Studi Terhadap Perusahaan yang Terdaftar Pada BEI Indeks Kompas 100 Tahun 2010 s.d 2012).* Jurnal Akuntansi, 4(1), 18-32.
- Ratnawati, Andalan Tri. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) Studi Empiris Pada Perusahaan Non Perbankan Yang Listing di BEI.* Media Ekonomi Dan Manajemen, 26(2), 66-78.
- Ruwita, Cahya dan Harto, Puji. (2013). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Resiko Perusahaan.* Jurnal Universitas Diponegoro, 2(2), 1-13.
- Rohmaniyah, F. I. (2016). *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Doctoral dissertation), STIE PERBANAS SURABAYA*, 1-12.
- Saputro, C., dan Bambang S., (2014). *Pengaruh struktur kepemilikan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko.* Jurnal

- Ilmu & Riset Akuntansi, 3(2), 1-14.
- Sari, Fuji Juwita. (2013). *Pengaruh Corporate Governance, Konsentrasi Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2011)*. Accounting Analysis Journal, 2(2), 163-170.
- Setiawan, D. (2016). *Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan Consumer Goods di BEI Periode 2010-2015 (Doctoral dissertation)*, STIE PERBANAS SURABAYA, 1-20.
- Setyarini, Yudiati I. (2011). "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan risk management committee". Skripsi. Universitas Diponegoro, 1-71.
- Sinaga, W. A., Nazar, M. R., & Muslih, M. (2018). *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Risk Management Committee (RMC), dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan Enterprise Risk Management (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2016)*. EProceeding of Management, 5(2), 2410-2417.
- Siti Rohmatul Fajriah. (2017). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko. dan Sularto, Lana. (2007). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Proceeding PESAT, 2, 53-61.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Developent*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistyaningsih, S., & Gunawan, B. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Risk Management Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-*

- 2014). Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1-11.
- Sulistyaningsih, & Gunawan, B. (2016). *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Risk Management Disclosure*. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1-11.
- Swarte, W., Lindrianasari, L., Prasetyo, T. J., Sudrajat, S., & Dharma, F. (2019). *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 3(4), 505-523.
- Syaifurakhman, B., & Laksito, H. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014)*. Diponegoro Journal of Accounting, 5(4), 1-12.
- Syifa', Layyinatusy. (2013). *Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, 2(3), 286-294.
- Tarantika, R. A., & Solikhah, B. (2019). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko*. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), 2(2), 142-155. <https://doi.org/10.32500/jematech.v2i2.722%0A>, diakses tanggal 10 November 2019.
- Utami, I. C. (2015). *Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal Audit, Komite Manajemen Risiko dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Dimensi ISO 31000)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1-14.
- Utomo, Yogi dan Anis Chariri. (2014). *Determinan Pengungkapan Risiko pada Perusahaan Non Keuangan di Indonesia*. Diponegoro Journal of Accounting, 3(3), 1-60.
- Wicaksono, S. A., & Adiwibowo, A. S. (2017). *Analisis Determinan Pengungkapan Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)*. Diponegoro Journal of Accounting, 6(4), 1-14.
- Widiyawati, W., & Halmawati, H. (2018). *Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM)*

Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). Wahana Riset Akuntansi, 6(2), 1281-1296.

